

ANALISIS PERANAN DAN KONSEP AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN PADA SEKTOR PEMERINTAH DAN SWASTA

Wildatul Muawanah^{1*}, Sri Trisnarningsih²

*Email : 21062020003@student.upnjatim.ac.id¹, trisna.ak@upnjatim.ac.id²

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur^{1,2}

***Abstract** This study aims to examine the application of responsibility accounting along with its concepts and roles in the government and private sectors. Responsibility accounting is part of management accounting that collects and reports accounting information at the responsibility center. Where there is a responsibility center because there is a delegation of authority, and those who receive authority have an obligation to realize and account for it. This research is a literature review research that uses previous articles in the Mendeley and Google Scholar databases. The articles reviewed used the keywords "Role", "Concept", and "Responsibility Accounting". The articles reviewed show that the roles in accountability accounting for both the government and private sectors are not much different, namely as a cost control tool to support the number of costs, and responsibility accounting information can be used as a basis for assessing the performance of managers including performance evaluation. However, in accountability accounting the government sector places more emphasis on budget variants that support budget preparation. It differs from the private sector, that shows accountability accounting is more varied in its use, such as in the determination of each unit in determining the budget and controlling costs.*

***Keywords:** Role, Concept, Accountability Accounting*

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan akuntansi pertanggungjawaban beserta konsep dan peranannya pada sektor pemerintah maupun swasta. Akuntansi pertanggungjawaban bagian dari akuntansi manajemen yang mengumpulkan dan melaporkan informasi akuntansi pada pusat pertanggungjawaban. Dimana adanya pusat pertanggungjawaban karena terjadi pelimpahan wewenang, dan bagi yang menerima wewenang mempunyai kewajiban untuk merealisasikan dan mempertanggungjawabkannya. Penelitian ini adalah penelitian literature review yang menggunakan artikel sebelumnya di data base Mendeley dan Google Scholar. Artikel yang ditelaah menggunakan kata kunci "Peranan", "Konsep", "Akuntansi Pertanggungjawaban". Dari artikel yang ditelaah menunjukkan bahwa peranan dalam akuntansi pertanggungjawaban baik sektor pemerintah maupun swasta tidak jauh berbeda, yaitu sebagai alat pengendalian biaya dalam menunjang besaran biaya, serta informasi akuntansi pertanggungjawaban dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai kinerja manajer mencakup pengevaluasian kinerja. Hanya saja, dalam akuntansi pertanggungjawaban sektor pemerintah lebih menekankan pada varian anggaran yang menunjang penyusunan anggaran. Sedangkan dalam sektor swasta nyatanya akuntansi pertanggungjawaban lebih variatif dalam penggunaannya, seperti pada penentuan dari masing-masing unit penentuan anggaran dan pengendalian biaya.

Kata kunci: Peranan, Konsep, Akuntansi Pertanggungjawaban.

Pendahuluan

Era globalisasi ditandai dengan perubahan yang berorientasi terhadap perkembangan dunia ekonomi yang begitu pesat dan ketat (Juwita, 2020). Perusahaan yang kian dituntut agar mampu mengendalikan aktivitas operasionalnya, agar tetap mampu bersaing dalam menciptakan kondisi ekonomi yang inovatif dan kompetitif. Usaha dalam menciptakan peluang dan memenangkan persaingan di era globalisasi ini, perusahaan perlu meningkatkan kinerja manajerial (Novitayanti, 2019). Salah satu upaya tersebut yakni dengan melakukan partisipasi yang lebih baik dan berhati-hati dalam melakukan perencanaan, pengorganisasian, dan penyusunan anggaran, pengawasan, serta pengendalian (Juwita, 2020).

Dalam sistem manajemen modern, perencanaan dan pengendalian menjadi hal yang paling penting dalam fungsi manajemen. Perencanaan merupakan proses berpikir dalam pengambilan keputusan sehingga menjadi penting, serta selain pengendalian menjadi salah satu cara dalam mengoptimalkan laba perusahaan, pengendalian juga sebagai proses dalam memastikan berjalannya aktivitas perusahaan yang sesuai dengan tujuan yang telah dicanangkan sebelumnya (Suherman, 2019). Untuk itu, akuntansi pertanggungjawaban hadir sebagai alat untuk membantu manajemen perusahaan pada masing-masing pusat pertanggungjawaban dalam rangka pengambilan keputusan secara menyeluruh (Novitayanti, 2019).

Akuntansi pertanggungjawaban berfungsi untuk mengumpulkan dan melaporkan informasi akuntansi pada pusat pertanggungjawaban (Suherman, 2019). Akuntansi pertanggungjawaban yang pada dasarnya sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja dari manajemen perusahaan. Kinerja manajemen sendiri merupakan serangkaian proses manajerial mulai dari perencanaan, evaluasi dan penilaian kinerja guna mewujudkan tujuan perusahaan (Sumual et al., 2018). Manajer puncak adalah pusat pertanggungjawaban yang menjadi pemimpin dari sub unitnya. Dalam melakukan penilaian kinerja dari pusat pertanggungjawaban dalam perusahaan membutuhkan sinkronisasi peranan dari berbagai bidang ilmu, yaitu salah satunya adalah penerapan ilmu akuntansi pertanggungjawaban. Dikarenakan ilmu akuntansi berperan sebagai sarana yang memberikan informasi mengenai kinerja sub unit organisasi melalui laporan finansial yang tersedia sehingga bisa digunakan berbagai pihak, khususnya manajemen dalam pengambilan keputusan. Akuntansi pertanggungjawaban memiliki fungsi sebagai suatu alat untuk menilai rencana atau anggaran yang dibuat dengan realisasi di lapangan, sehingga nantinya akan diketahui besaran pendapatan dan biaya dari masing departemen (Sumariyani & Kurniawan, 2020).

Hakikat dari akuntansi pertanggungjawaban sebagai sistem perbandingan anggaran dengan realisasi di setiap pusat pertanggungjawaban untuk mengukur kinerja manajemen. Beberapa penelitian seperti yang diteliti oleh (Cahyani & Damyanthi, 2019) menemukan bahwa diterapkannya akuntansi pertanggungjawaban mampu memberikan dampak positif terhadap kinerja perusahaan. Konsep akuntansi yang memiliki sisi baik dan buruk dalam mendorong sifat egois pada masing-masing individu yang memiliki tujuan dan kepentingan yang berbeda (Magdalena & Sawarjuwono, 2020). Adanya penyelarasan tujuan (*goal congruence*) dengan menanamkan implementasi akuntansi pertanggungjawaban yang membangun empati dan saling menerapkan transfer nilai berkesinambungan dan konsisten menuju organisasi yang berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penerapan akuntansi pertanggungjawaban dari segi peranan dan konsep yang diterapkan di sektor pemerintahan dan swasta. Sehingga, tujuan penelitian ini untuk memahami perbedaan dalam peranan pengaplikasian akuntansi pertanggungjawaban pada semua sektor khususnya pemerintahan dan swasta.

Teori Agensi

Teori Agensi diperkenalkan oleh Jensen, Meckling pada tahun 1976. Teori agensi atau keagenan sebagai pemberian wewenang dari *principal* pada *agent* berdasarkan kontrak (Luayyi, 2012). Teori agensi merupakan kesepakatan antar manajemen puncak dengan manajer divisi maupun bagian lain yang memiliki kepentingan. Adapun perbedaan kepentingan tersebut biasanya apabila pribadi maka akan berusaha untuk menguntungkan dirinya sendiri. Pihak manajemen puncak bertujuan untuk hasil yang maksimal agar mendapatkan laba yang tinggi, sedangkan pihak manajer divisi keuangan bertujuan agar kepentingannya dapat diakomodir melalui kompensasi yang akan diberikan, atau berupa bonus dan insentif. Namun, terkadang realitanya untuk mencapai kepentingan pribadi tersebut tanggungjawabnya ikut terabaikan dan tidak efektif (Cahyani & Damayanthi, 2019).

Akuntansi Pertanggungjawaban

Akuntansi pertanggungjawaban merupakan sistem akuntansi, yang biayanya dibebankan kepada berbagai tingkat pimpinan sesuai tempat kendali biaya dianggap berada dengan para manajernya bertanggungjawab atas selisih yang terjadi antara anggaran dengan realisasinya (Jusmani & Mursalin, 2020). Sedangkan menurut (Mulyadi, 2001:70) Akuntansi pertanggungjawaban sebagai sistem akuntansi yang mengumpulkan dan melaporkan pendapatan dan biaya sesuai dengan pusat pertanggungjawaban agar dapat diketahui dan ditunjuk siapa yang bertanggungjawab dengan penganggaran tersebut. Sederhananya, dengan adanya pusat pertanggungjawaban terjadi karena adanya pelimpahan wewenang, dan bagi penerima wewenang memiliki kewajiban untuk merealisasikan dan mempertanggung-jawabkannya (Cahyani & Damayanthi, 2019).

Manfaat sistem akuntansi pertanggungjawaban ialah informasi akuntansi di masa lalu. Hal itu berguna untuk menilai kinerja manajer pusat pertanggungjawaban, juga sebagai motivasi manajer. Informasi akuntansi pertanggungjawaban sendiri bisa dipakai sebagai dasar dalam menilai kinerja manajer pusat. Perusahaan dapat mengetahui tentang pemberian peran terhadap tiap-tiap pusat tanggung jawab berdasarkan pengusulan anggaran pada kegiatan yang akan direalisasikan. Peran tersebut nantinya akan dapat dinilai sejauh mana pusat biaya mampu dilaksanakan, serta bagaimana penggunaannya dan kesesuaian antara perencanaan dan pengendalian. Semua itu dapat dilihat dari laporan pertanggungjawaban biaya dan juga dapat dinilai mengenai anggaran yang telah ditetapkan sesuai tidaknya dengan ketentuan yang sudah dibuat dan dilaksanakan secara baik dan benar (Jusmani & Mursalin, 2020).

Akuntansi pertanggungjawaban memiliki empat elemen, pembebanan tanggungjawab, *bencmarking*, evaluasi kinerja, dan pemberian penghargaan (Prima, 2014). Adapun syarat-syarat penting dalam menciptakan akuntansi pertanggungjawaban serta mempertahankannya yaitu dengan cara: (1) menentukan garis tanggung jawab atau wewenang yang jelas untuk masing-masing tingkatan manajemen sesuai dengan struktur perusahaan; (2) mencatat dan menilai pegawai berdasarkan garis wewenang dan masing-masing tanggung jawab; (3) menyusun sistem administrasi dengan menyesuaikan garis wewenang serta tanggung jawab sebagaimana ketentuan seperti diajukan dalam anggaran; (4) adanya pengendalian biaya yang sesuai sistem akuntansi biaya serta pelaporan biaya yang rutin dari masing-masing departemen (Savitri & Mimba, 2020).

Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan pendekatan telaah literatur (*literature review*), yang merupakan hasil analisis artikel yang relevan. Berfokus untuk mengupas tentang penjelasan penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam pengendalian biaya lintas sektor.

Dilakukanlah pencarian beberapa hasil penelitian dengan menggunakan kata kunci “*akuntansi pertanggungjawaban*”, “Peranan”, “Konsep” di data base Mendeley dan Google Scholar. Artikel diseleksi berdasarkan beberapa karakteristik, *Pertama* yaitu menjelaskan definisi, akuntansi pertanggungjawaban, dan praktik penerapannya di sektor pemerintahan maupun swasta. *Kedua*, metode penelitian yang digunakan. *Ketiga*, tidak membedakan objek penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Wujud dari akuntansi pertanggungjawaban terdapat pada pengendalian anggaran perusahaan. Setiap pengendalian yang digunakan harus sesuai dengan informasi dan realisasinya. Juga, setiap pusat pertanggungjawaban memiliki bukti dan bisa mempertanggungjawabkan seluruh biaya dan anggaran yang telah dibuat (Juwita, 2020). Akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial (Cahyani & Damayanthi, 2019). Penelitian yang dilakukan di PT Pegadaian Kota Denpasar menyebutkan semakin baik pertanggungjawaban manajer divisi keuangan pada laporan akuntansinya maka akan semakin meningkatkan kinerja manajerialnya. Hal ini sesuai dengan penelitian (Savitri & Mimba, 2020) yang juga menyatakan bahwa akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh positif pada efektivitas pengendalian biaya. Efektivitas pengendalian biaya ditentukan oleh penerapan dari akuntansi pertanggungjawaban di Arta Sedana Supermarket & Departement Store dan Harum Fajar. Selain itu, motivasi kerja rupanya menjadi bagian dari penerapan akuntansi pertanggungjawaban yang memoderasi hubungan keduanya yaitu akuntansi pertanggungjawaban dengan efektivitas pengendalian biaya. Dalam menentukan anggaran biaya pemasaran juga dibutuhkan penerapan akuntansi pertanggungjawaban yang kenyataannya masih ada beberapa perusahaan yang belum sepenuhnya menerapkan sesuai dengan standar baku (Suherman, 2019). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari Suherman (2019) menyatakan dari adanya penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada Kantor Pos Ciamis berimplikasi terhadap penentuan anggaran biaya pemasaran. Akuntansi pertanggungjawaban di Kantor Pos Ciamis tergolong efektif karena struktur organisasi sudah ada pendelegasian wewenang dan tanggung jawab, serta penggolongan biaya, sistem pelaporan dan penyusunan anggaran biaya pemasarannya. Begitupula dalam pengendalian biaya administrasi dan umum, Jusmani & Mursalin (2020) menyatakan bahwa peranan akuntansi pertanggungjawaban dalam menunjang pengendalian biaya administrasi dan umum.

Penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada industri manufaktur tidak jauh berbeda dari yang lain, karena sesuai dengan penelitian (Setiyanto & Norafyana, 2017) bahwa ada pengaruh positif penerapan akuntansi pertanggungjawaban dengan pengendalian biaya, penelitian yang dilakukan di Batam ini menunjukkan bahwa struktur organisasi, anggaran, pengendalian dan pelaporan dalam akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh terhadap pengendalian biaya. Seperti halnya pusat perbelanjaan yang memiliki kegiatan operasional yang begitu luas, hal tersebut menjadi suatu keharusan didalamnya membutuhkan pengendalian biaya yang perlu dilakukan oleh manajer beserta bantuan pihak lain. Sehingga penerapan akuntansi pertanggungjawaban sangat diperlukan guna menerapkan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dalam mencapai pengendalian biaya yang efektif dan efisien (Savitri & Mimba, 2020).

Sistem akuntansi pertanggungjawaban dapat dianalisis menggunakan pusat pertanggungjawaban yang meliputi analisis pusat biaya mengenai anggaran dan realisasi perusahaan. Adapun peranan informasi akuntansi pertanggungjawaban dalam memberikan penilaian terhadap laporan keuangan dapat dilihat dengan menggunakan analisis *gross*

profit margin, operating profit margin, dan net profit margin. Hal ini dapat dilihat dari sistem akuntansi pertanggungjawaban yang dilakukan oleh (Novitayanti, 2019) pada PT Arta Sedana Tahun 2016. Hasil penelitian tersebut menggambarkan PT Arta Sedana telah sesuai dan memenuhi syarat pertanggungjawaban dengan menyusun anggaran terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan operasional. Peran laporan pertanggungjawaban dalam mencapai sasaran dengan memungkinkan perusahaan dapat mengendalikan besarnya biaya yang dikeluarkan agar tidak terjadi pemborosan.

Anggaran pada sektor publik dengan proses aktivitas dalam satuan moneter yang menggunakan dana milik rakyat, atau dikenal dengan menerapkan *bottom-up*. Implementasi akuntansi pertanggungjawaban pada sektor pemerintah yang dilakukan di Bapenda Jawa Barat menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara akuntansi pertanggungjawaban dan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial (Juwita, 2020). Adanya peran penting dalam implementasi akuntansi pertanggungjawaban dalam penyusunan anggaran pemerintah daerah (Susanto, 2018). Implementasi anggaran berbasis kinerja dalam pemerintahan sesuai dengan reformasi pengelolaan keuangan Negara yang diamanatkan dalam UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyatakan ada tiga masalah pokok yang memperburuk kualitas penganggaran pemerintahan di Indonesia, diantaranya yaitu kuatnya aspek teknokrasi di penganggaran, pemda dengan pemerintah pusat tidak sinkron dalam perencanaan anggarannya sehingga berujung lamban pada serapan anggaran, dan realisasi anggaran. Selanjutnya, banyaknya pemda yang menyelenggarakan tender di awal tahun sedangkan prosesnya sangat lama. Ketiga, yaitu hampir seluruh daerah minim transparansi anggaran (Juwita, 2020). Mengenai karakteristik akuntansi pertanggungjawaban pada pemerintah daerah menurut Hanifa (2019) menyatakan bahwa ada perbedaan wewenang dalam penyusunan anggaran dan karakteristik komponen anggaran terhadap bobot respon yang lebih besar terhadap varian anggaran, serta ada efek ratchet pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan komponen belanja langsung. Hal ini didukung dengan penelitian (Susanto, 2018) adanya peran penting dari akuntansi pertanggungjawaban dalam menjelaskan perbedaan respon terhadap varian anggaran dalam penyusunan anggaran pemerintah anggaran pemerintah daerah dan adanya efek *ratchet* yang dilakukan pada satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Elemen lainnya dalam sistem akuntansi pertanggungjawaban yaitu kinerja perusahaan atau pengevaluasian kinerja (Prima, 2014). Kinerja sebagai salah satu faktor yang mendukung tercapainya tujuan perusahaan. Sehingga baik atau buruknya kinerja manajemen dapat dilihat dari hasil penilaian kinerja (Hasna & Rachman, 2020). Menurut hasil penelitian (Sumariyani & Kurniawan, 2020) akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh positif terhadap kinerja. Penelitian yang dilakukan pada hotel berbintang di Kabupaten Buleleng tersebut menggambarkan adanya kompetensi sumber daya manusia yang mempengaruhi kinerja, juga bentuk adanya komitmen perusahaan di dalamnya yang juga berdampak bagi kinerja di hotel berbintang di Kabupaten Buleleng. Didukung oleh penelitian (Hasna & Rachman, 2020) yang menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam penilaian kinerja pusat pertanggungjawaban dapat dikatakan cukup baik pada PT. Taspen (Persero) KC Bogor. Sedangkan untuk penilaian kinerja koperasi berpedoman pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 14 Tahun 2009 tentang penilaian kesehatan koperasi. Analisis yang dilakukan di koperasi di Kabupaten Magelang mengenai akuntansi pertanggungjawaban dalam penilaian kinerja pada koperasi pegawai republik indonesia dalam aspek kinerja manajemen dinyatakan sehat pada tahun 2012 hingga 2014 dinyatakan sehat dengan nilai 34,98 (Arif & Imron, 2018). Sedangkan

pada industri perbankan yang membutuhkan peranan akuntansi pertanggungjawaban seperti pada PT. Bank Mandiri khususnya pada pusat pendapatan dengan menggunakan metode ipteks (Kumaat & Maradesa, 2018). Penerapan metode pemasaran pada pusat pendapatan ini guna mencapai target dan tanggungjawabnya dengan menggunakan metode *Order-Getting* dan *Order Filling*. *Order getting* berupa metode usaha dalam memikat pasar sedangkan *Order Filling* sebagai kegiatan kasat mata atau nyata yang diulang.

Peranan akuntansi pertanggungjawaban di Rumah Sakit pada penerapannya dapat dilihat dari laporan laba rugi. Seperti yang telah diterapkan di Rumah Sakit Pancaran Kasih Manado menurut hasil penelitian (Sumual et al., 2018) yang dinyatakan menurut laporan laba rugi pada tahun 2015 memperoleh keuntungan. Di luar itu Rumah Sakit Manado telah menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan Pelayanan dalam klaim BPJS yang ditetapkan oleh Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) sesuai dengan UU Nomer 24 Tahun 2011 Pasal 02 tentang Badan Penyelenggara Jaminana Sosial (BPJS).

Adanya penerapan akuntansi pertanggungjawaban baik sektor swasta maupun pemerintahan memiliki implikasi yang sama dalam memberikan manfaat yaitu pada penilaian kinerja, pengevaluasian kinerja serta pengendalian biaya dan anggaran dari setiap divisi operasional perusahaan.

Simpulan

Konsep akuntansi pertanggungjawaban telah banyak diterapkan baik dalam sektor pemerintahan dan swasta, yakni dalam memudahkan perusahaan untuk menilai kinerja divisi, manajemen, dan kinerja perusahaan yang perlu ada perbaikan. Serta implementasi dari akuntansi pertanggungjawaban dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab pada masing-masing pusat pertanggungjawaban yang dalam hal ini memberikan implikasi pada penyusunan anggaran, pengendalian anggaran baik dalam penyusunan dan perencanaannya.

Peranan akuntansi pertanggungjawaban baik sektor pemerintah maupun swasta tidak jauh berbeda, yaitu sebagai alat pengendalian biaya dalam menunjang besaran biaya, membantu menentukan anggaran, serta menilai kinerja manajer yang mencakup pengevaluasian kinerja. Namun, dalam akuntansi pertanggungjawaban sektor pemerintah lebih menekankan pada varian anggaran yang menunjang penyusunan anggaran. Sedangkan dalam sektor swasta nyatanya akuntansi pertanggungjawaban lebih variatif dalam penggunaannya, seperti pada penentuan dari masing-masing unit penentuan anggaran dan pengendalian biaya.

Peneliti merekomendasi dan menyarankan untuk penelitian selanjutnya di bidang ini, agar menggunakan metode wawancara dan kuesioner atau penelitian secara langsung ke sektor pemerintah maupun swasta untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih maksimal dan aktual. Sehingga demi perbaikan penelitian berikutnya, apabila menggunakan studi literature untuk menambahkan referensi terkait yang lebih variatif dan lengkap.

Daftar Pustaka

- Arif, D. M., & Imron, M. (2018). Analisis Akuntansi Pertanggungjawaban Dalam Penilaian Kinerja Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Sempulur, Kabupaten Magelang. *Jurnal REKSA: Rekayasa Keuangan, Syariah Dan Audit*, 4(2), 148. <https://doi.org/10.12928/j.reksa.v4i2.153>
- Ayusta Devi Savitri, K., & Sri Harta Mimba, N. P. (2020). Pengaruh Akuntansi Pertanggungjawaban pada Efektivitas Pengendalian Biaya dengan Motivasi Kerja sebagai Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(8), 1927. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i08.p03>

- Cahyani, K. N., & Damayanthi, I. G. A. E. (2019). Pengaruh Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban, Kompetensi dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial. *E-Jurnal Akuntansi*, 28, 270. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i01.p11>
- Hanifa, L. (2019). Tinjauan Atas Akuntansi Pertanggungjawaban Anggaran: Studi Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buton. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 3(1), 33–40. <https://doi.org/10.35326/pencerah.v3i1.263>
- Hasna, D. L., & Rachman, R. (2020). Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Dalam Penilaian Kinerja Pada Pt. Taspen (Persero) Kc Bogor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 8(1), 67–76. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v8i1.422>
- Jusmani, J., & Mursalin, M. (2020). Manfaat Akuntansi Pertanggungjawaban Dalam Pengendalian Biaya Administrasi dan Umum. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 17(1), 43. <https://doi.org/10.31851/jmwe.v17i1.4335>
- Juwita, R. (2020). Implementasi Akuntansi Pertanggungjawaban Dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Di Satuan Organisasi Pemerintahan Propinsi Jawa Barat. *E-Journal Poltekkes*, 15(1), 48–59.
- Kumaat, G. E., & Maradesa, D. (2018). Ipteks Akuntansi Pertanggungjawaban Pusat Pendapatan Pt. Bank Mandiri. *Jurnal Ipteks Akuntansi Bagi Masyarakat*, 2(02), 457–460. <https://doi.org/10.32400/jiam.2.02.2018.21803>
- Luayyi, S. (2012). Teori Keagenan Dan Manajemen Laba Dari Sudut Pandang Etika Manajer. *El Muhasaba: Jurnal Akuntansi*, 1(2), 199–216. <https://doi.org/10.18860/em.v1i2.1871>
- Magdalena, R., & Sawarjuwono, T. (2020). Konsep akuntansi pertanggungjawaban: perspektif filsafat kuno Tiongkok yin yang dan wu xing. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 7(2), 81–90. <https://doi.org/10.17977/um004v7i22020p81>
- Mulyadi. (2001). Sistem Akuntansi. In *Salemba Empat Edisi Ketiga*.
- Novitayanti, D. K. (2019). Peranan Informasi Akuntansi Pertanggungjawaban Dalam. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 11(1), 64–74.
- Prima, H. (2014). Pengaruh Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Manajerial pada Hotel Berbintang di Daerah Istimewa Yogyakarta (Survei pada Hotel Berbintang 2 – 5 di Daerah Istimewa Yogyakarta). *Atma Jaya Yogyakarta*, 1(69), 5–24.
- Setiyanto, A. I., & Norafyana, N. (2017). Pengaruh Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Pengendalian Biaya Pada Industri Manufaktur Di Batam. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 9(1), 45. <https://doi.org/10.17509/jaset.v9i1.5256>
- Suherman, A. (2019). Analisis Akuntansi Pertanggungjawaban dalam Penentuan Anggaran Biaya Pemasaran. *Business Innovation and Entrepreneurship Journal*, 1(1), 1–4. <https://doi.org/10.35899/biej.v1i1.6>
- Sumariyani, N. M. R., & Kurniawan, P. S. (2020). Pengaruh Akuntansi Pertanggungjawaban, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Hotel Berbintang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 10(2), 214. <https://doi.org/10.23887/jiah.v10i2.25581>
- Sumual, J. R., Alexander, S. W., & Rondonuwu, S. (2018). Analisis Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Evaluasi Kinerja Manajemen Terhadap Klaim BPJS di Rumah Sakit Pancaran Kasih Manado. *Jurnal Riset Going Concern*, 13(3), 428–435.
- Susanto, A. A. (2018). Pertanggungjawaban pada Penganggaran Pemerintah Daerah : Bukti Efek Ratchet pada Anggaran Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) Anindyo Aji Susanto. *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(2), 187–205.